

METODOLOGI PENYUSUNAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANALISIS KOMPONEN BIAYA, KEBUTUHAN SATUAN PENDIDIKAN, DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH

Resti Wahyuni¹

Universitas Islam Indragiri

Email: restiwhyuni041005@gmail.com

Anna Fitria²

Universitas Islam Indragiri

Email: annaftria14@gmail.com

Abstract

Kewyboard :

*Education Financing Standards
Needs Analysis
Education Financial Management.*

This study discusses the methodology for developing educational financing standards as an essential basis for financial management in educational institutions. The main objectives of this study are to explain the concept of educational financing, systematically analyze financial needs, and outline the methodological steps in formulating financing standards in accordance with national regulations. The study uses a qualitative-descriptive approach by reviewing various literature, government regulations, and previous research results related to cost components, financing principles, and financing implementation in educational institutions. The results of the discussion indicate that educational financing standards consist of three main components: investment costs, personnel costs, and operational costs. These three components serve as guidelines for educational institutions to allocate budgets effectively, efficiently, and accountably. The analysis of financial needs was found to be a crucial stage in determining the realistic nature of the financing plan in educational institutions. Furthermore, the study also highlights obstacles in the implementation of post-decentralization financing, such as delays in fund allocation, budget discrepancies, and limited flexibility in fund use. In conclusion, developing educational financing standards requires a systematic, accurate, and needs-based methodology for the institution to achieve sustainable quality of educational services.

Abstrak

Kata Kunci :
Standar Pembiayaan Pendidikan
Analisis Kebutuhan
Manajemen Keuangan pendidikan

Penelitian ini membahas metodologi penyusunan standar pembiayaan pendidikan sebagai dasar penting dalam pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan. Tujuan utama penelitian ini adalah menjelaskan konsep pembiayaan pendidikan, menganalisis kebutuhan biaya secara sistematis, serta memaparkan langkah-langkah metodologis dalam merumuskan standar pembiayaan yang sesuai dengan regulasi nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menelaah berbagai literatur, regulasi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu terkait komponen biaya, prinsip pembiayaan, dan implementasi pembiayaan pada satuan pendidikan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa standar pembiayaan pendidikan terdiri dari tiga komponen utama: biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasional. Ketiganya berfungsi sebagai pedoman agar satuan pendidikan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Analisis kebutuhan biaya ditemukan menjadi tahapan krusial yang menentukan

realistik atau tidaknya rancangan pembiayaan dalam satuan pendidikan. Selain itu, penelitian juga menyoroti hambatan dalam implementasi pembiayaan pasca desentralisasi, seperti keterlambatan alokasi dana, ketidaksesuaian anggaran, serta keterbatasan fleksibilitas penggunaan dana. Kesimpulannya, penyusunan standar pembiayaan pendidikan memerlukan metodologi yang sistematis, akurat, dan berbasis kebutuhan nyata lembaga agar mutu layanan pendidikan dapat tercapai secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen strategis dalam manajemen pendidikan, karena menentukan keberlangsungan layanan pendidikan dan kualitas proses pembelajaran. Setiap satuan pendidikan memerlukan standar pembiayaan yang jelas, terukur, dan sesuai kebutuhan agar mampu menjalankan kegiatan operasional maupun pengembangan secara efektif. Namun, penyusunan standar pembiayaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan; diperlukan metodologi yang sistematis dan berbasis analisis kebutuhan nyata di lapangan. Urgensi kajian ini muncul dari kenyataan bahwa hingga kini banyak satuan pendidikan mengalami ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran akibat lemahnya analisis kebutuhan dan ketidaksesuaian antara standar biaya dengan kondisi aktual sekolah.¹

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan menghadapi beragam tantangan. Handayani dan Huda menemukan bahwa pasca-desentralisasi pendidikan, sekolah sering menghadapi keterlambatan penyaluran dana dan keterbatasan fleksibilitas penggunaan anggaran.² Penelitian lain oleh Mulya menegaskan bahwa efektivitas pembiayaan sangat dipengaruhi oleh ketepatan perencanaan dan kemampuan sekolah menganalisis kebutuhan biaya secara komprehensif.³ Sementara itu, Yelliza, Efriza, dan Darmayanti mengidentifikasi bahwa implementasi standar pembiayaan di sekolah dasar belum mampu memenuhi komponen biaya operasional dan investasi secara optimal.⁴ Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa masih terdapat jarak antara standar pembiayaan yang ideal dengan praktik penyusunan anggaran di lapangan.

Namun demikian, sebagian besar penelitian berfokus pada implementasi pembiayaan, bukan pada bagaimana metodologi penyusunan standar pembiayaan itu dirumuskan secara sistematis. Inilah kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar kebaruan artikel ini. Belum banyak kajian yang mengintegrasikan konsep pembiayaan, analisis kebutuhan biaya, serta langkah-langkah metodologis dalam penyusunan standar pembiayaan yang sesuai regulasi. Selain itu, dinamika harga barang, perubahan kebijakan daerah, serta kondisi spesifik satuan pendidikan belum banyak dibahas sebagai variabel penting dalam proses perumusan standar pembiayaan. Ketidakseragaman temuan penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya inkonsistensi terkait komponen biaya prioritas yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada pendekatan analitis yang mengembangkan isi makalah menjadi kajian yang lebih mendalam, dengan mengintegrasikan hasil penelitian terbaru, regulasi pemerintah, dan struktur metodologis penyusunan standar pembiayaan. Tidak hanya menjelaskan konsep dan komponen biaya pendidikan seperti dalam makalah, artikel ini juga menguraikan metodologi penyusunan standar pembiayaan, tantangan implementasi, serta urgensi analisis kebutuhan biaya sebagai fondasi penyusunan anggaran pendidikan yang akuntabel.

¹ Siti Nurhalimah, “Konsep Dan Jenis Pembiayaan Pendidikan,” *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/moe.v5i1.5240>.

² Isman Sumawar, *et al*, “Analisis Kebijakan Yang Mengatur Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar,” *Journal Education of Teacher Training And Learning* 3, no. 1 (2023): 37–44, <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/PEDIAMU/>.

³ Citra Mulya, “Implementasi Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengelolaan Dana BOS Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review* 3, no. 2 (2019): 149–154, <https://doi.org/http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:4321ijemar.v3i2.43670>.

⁴ Sepradeni *et al.*, “Analisis Pelaksanaan Standar Pembiayaan Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Amanah Sungai Penuh,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 21525–21531, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30388>.

Permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini meliputi: (1) apa yang dimaksud dengan konsep pembiayaan pendidikan dan standar pembiayaan; (2) bagaimana analisis kebutuhan pembiayaan dilakukan; dan (3) bagaimana metodologi penyusunan standar pembiayaan pendidikan dirumuskan secara sistematis. Konteks penelitian ini berada pada manajemen keuangan pendidikan di Indonesia, dengan unit analisis berupa konsep, komponen biaya, dan metodologi penyusunan standar pembiayaan pada satuan pendidikan.

Struktur artikel ini terdiri dari tiga bagian utama: bagian pertama membahas konsep pembiayaan pendidikan dan standar pembiayaan; bagian kedua menguraikan analisis kebutuhan pembiayaan; dan bagian ketiga menjelaskan metodologi penyusunan standar pembiayaan pendidikan, termasuk komponen biaya, prinsip yang digunakan, serta tantangan implementasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan manajemen pembiayaan pendidikan dan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dalam menyusun standar pembiayaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada penelaahan konsep, teori, regulasi, dan temuan penelitian terkait penyusunan standar pembiayaan pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena proses perumusan standar biaya membutuhkan pemahaman komprehensif mengenai komponen biaya, prinsip pembiayaan, serta dinamika kebijakan pendidikan yang tertuang dalam literatur otoritatif. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelusuri jurnal nasional dan internasional, buku manajemen pendidikan, serta regulasi seperti Permendikbudristek dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Seluruh sumber yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi terhadap topik pembiayaan pendidikan dan analisis kebutuhan biaya. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pengumpul data, analis, dan penginterpretasi informasi melalui proses reduksi data, pengkodean, dan analisis tematik untuk menghasilkan pemahaman sistematis mengenai metodologi penyusunan standar pembiayaan.

Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu eksplorasi, analisis, dan sintesis. Pada tahap eksplorasi, peneliti mengidentifikasi konsep fundamental mengenai komponen biaya, prinsip pembiayaan, serta standar biaya yang diatur dalam kebijakan nasional. Tahap analisis dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian terdahulu, menilai persamaan dan perbedaan konsep, serta menelaah keterkaitannya dengan praktik penyusunan standar pembiayaan di sekolah. Selanjutnya, tahap sintesis menghasilkan rumusan metodologis yang memadukan konsep teoretis dan hasil penelitian untuk menjelaskan bagaimana standar pembiayaan disusun secara sistematis, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata lembaga pendidikan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber melalui perbandingan literatur berbeda dan regulasi terbaru, sehingga interpretasi yang dihasilkan kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi analisis dalam artikel, serta mendukung perumusan pembiayaan yang efektif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Metodologi Standar Penyusunan Biaya Pendidikan

Berdasarkan metode penelitian yang telah diuraikan, berikutnya dipaparkan hasil analisis dan pembahasan terkait metodologi penyusunan standar pembiayaan pendidikan.

Metodologi penyusunan standar pembiayaan pendidikan merupakan proses sistematis yang bertujuan menentukan besaran biaya yang diperlukan satuan pendidikan untuk menjalankan layanan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Proses ini diawali dengan identifikasi kebutuhan dasar lembaga pendidikan, mencakup sarana dan prasarana, kompetensi sumber daya manusia, kebutuhan pembelajaran, serta biaya operasional rutin. Setelah seluruh kebutuhan terdata secara komprehensif, dilakukan analisis komponen biaya dan perhitungan *unit cost* untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun bersifat realistik dan proporsional dengan kondisi riil sekolah. Tahapan berikutnya adalah penetapan standar biaya yang berfungsi sebagai batas minimal pembiayaan yang wajib dipenuhi agar layanan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Keseluruhan proses ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana ditetapkan dalam manajemen keuangan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan pada hakikatnya dipahami sebagai alokasi sejumlah dana atau jasa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Dana ini mencakup kebutuhan operasional, penyediaan sarana belajar, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, serta berbagai kegiatan pembelajaran yang harus berlangsung secara teratur. Dalam sistem pendidikan nasional, pembiayaan juga dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan sebagai bentuk dukungan terhadap fungsi pendidikan sebagai layanan publik. Standar Nasional Pendidikan secara tegas menetapkan adanya kriteria minimal pembiayaan pendidikan yang harus dipenuhi sekolah setiap tahun sebagai acuan dalam menghitung kebutuhan anggaran.

Secara struktural, standar pembiayaan mencakup tiga komponen utama, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi meliputi pengadaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan penyediaan modal kerja tetap yang mendukung keberlanjutan proses pembelajaran. Biaya personal berkaitan dengan pengeluaran peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, seperti pembelian perlengkapan belajar dan kebutuhan lainnya. Sementara itu, biaya operasional terdiri atas pengeluaran rutin sekolah, mulai dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana, utilitas, hingga bahan habis pakai. Ketiga komponen biaya ini berfungsi sebagai fondasi utama untuk memastikan mutu layanan pendidikan dan keberlangsungan seluruh aktivitas pendidikan.⁵

Penelitian pada dasarnya merupakan proses sistematis untuk menemukan jawaban atas permasalahan tertentu melalui prosedur ilmiah yang terstruktur. Dalam konteks penyusunan standar pembiayaan pendidikan, proses penelitian menjadi sangat penting karena metodologi penyusunan standar biaya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan. Setiap tahapan mulai dari identifikasi kebutuhan, pemetaan komponen biaya, hingga perhitungan *unit cost* memerlukan data empiris yang akurat agar standar pembiayaan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil satuan pendidikan. Rasa ingin tahu terhadap ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dan alokasi anggaran juga menjadi pendorong utama mengapa penelitian diperlukan. Melalui pendekatan ilmiah, metodologi penyusunan standar pembiayaan dapat menghasilkan gambaran yang lebih obyektif mengenai kebutuhan sarana-prasarana, kegiatan pembelajaran, SDM, dan biaya operasional, sehingga setiap keputusan anggaran memiliki dasar analitis yang jelas.

Pentingnya metodologi dalam penyusunan standar pembiayaan terletak pada fungsinya untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Tanpa metodologi yang kuat, standar pembiayaan berisiko tidak efektif, tidak proporsional, atau bahkan tidak mampu menjawab kebutuhan operasional sekolah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketidaktepatan analisis kebutuhan sering mengakibatkan pemborosan, kekurangan anggaran, atau ketidakseimbangan pendanaan antar sekolah. Oleh karena itu, penggunaan metode ilmiah dalam menyusun standar pembiayaan memberikan landasan rasional untuk menentukan batas minimal biaya pendidikan, sekaligus memastikan bahwa pendanaan yang disusun sejalan dengan prinsip efektivitas dan keberlanjutan layanan pendidikan. Dengan demikian, metodologi bukan hanya alat teknis, tetapi menjadi kunci utama untuk menghasilkan standar pembiayaan yang valid, dapat diterapkan, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.⁶

Komponen Standar penyusunan biayaan Pendidikan

Standar pembiayaan pendidikan pada dasarnya terdiri atas tiga komponen utama, yaitu biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasional satuan pendidikan. Biaya investasi merupakan alokasi jangka panjang yang mencakup pembangunan sarana-prasarana seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan program peningkatan kompetensi guru. Karena sifatnya yang periodik, biaya investasi memerlukan metodologi perencanaan yang matang agar prioritas pembangunan dapat ditetapkan secara tepat dan berkelanjutan. Banyak penelitian menunjukkan

⁵ Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam," *ESENSI: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 4, no. 1 (2014): 67–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>.

⁶ Zainal A. Hasibuan, *Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi* (Universitas Indonesia, 2007).

bahwa ketidaktepatan perencanaan investasi menyebabkan kekurangan fasilitas yang berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran.

Di sisi lain, biaya personal mencakup pengeluaran peserta didik untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran seperti seragam, buku, alat tulis, dan transportasi, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga sehingga menjadi isu penting dalam pemerataan akses pendidikan. Adapun biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji tenaga pendidik, bahan habis pakai, utilitas, serta pemeliharaan sarana prasarana yang harus dipenuhi secara rutin agar kegiatan pendidikan berjalan efektif. Tanpa standar pembiayaan yang jelas, sekolah rentan mengalami ketidakstabilan anggaran, ketidakseimbangan antar pos biaya, serta pemanfaatan dana yang tidak efisien. Oleh karena itu, metodologi penyusunan standar pembiayaan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan pemerataan mutu layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan

- a. **Biaya investasi** : Biaya investasi merupakan komponen pembiayaan jangka panjang yang menjadi fondasi bagi keberlanjutan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Biaya ini mencakup pembangunan dan pengadaan sarana-prasarana, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, investasi sumber daya manusia seperti pelatihan guru, penguatan kompetensi pedagogik, dan pengembangan profesional berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari komponen ini. Karakter biaya investasi yang tidak dikeluarkan setiap tahun menuntut adanya metodologi perencanaan yang sistematis dan berbasis data agar prioritas investasi dapat ditentukan secara tepat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hambatan mutu pendidikan sering berasal dari ketidaktepatan perencanaan investasi, sehingga metodologi penyusunan standar biaya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi investasi benar-benar menjawab kebutuhan perkembangan sekolah.
- b. **Biaya Personal**: Biaya personal merupakan pengeluaran yang harus ditanggung oleh peserta didik agar mereka dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Komponen ini meliputi pembelian buku, alat tulis, seragam, kebutuhan transportasi, dan biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar. Variasi tingkat ekonomi keluarga menjadikan biaya personal sebagai aspek krusial dalam pemerataan akses pendidikan. Apabila standar pembiayaan tidak disusun dengan metodologi yang kuat, maka risiko ketidakadilan dalam akses pendidikan meningkat, karena sekolah tidak memiliki acuan untuk menentukan berapa besar beban finansial yang ideal bagi peserta didik. Oleh karena itu, metodologi penyusunan standar pembiayaan berfungsi untuk menyeimbangkan kemampuan sekolah dalam menyediakan layanan dengan kemampuan ekonomi peserta didik, sehingga pendidikan tetap inklusif dan tidak menimbulkan hambatan finansial.
- c. **Biaya Operasional Satuan Pendidikan**: Biaya operasional adalah komponen pembiayaan rutin yang dikeluarkan sekolah untuk menjaga kelancaran kegiatan pendidikan sehari-hari. Termasuk di dalamnya gaji guru dan tenaga kependidikan, bahan habis pakai, listrik, air, internet, telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, serta berbagai biaya kegiatan sekolah. Karena sifatnya yang berkelanjutan, komponen ini sangat membutuhkan standar pembiayaan yang akurat agar sekolah dapat mengelola anggaran secara efisien tanpa kekurangan atau pemborosan. Banyak temuan menunjukkan bahwa tanpa standar operasional biaya yang terukur, sekolah sering mengalami ketidakseimbangan pendanaan antar pos anggaran. Dengan demikian, metodologi penyusunan standar biaya memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan operasional dan mendukung keberlanjutan mutu layanan pendidikan.⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan merupakan bagian penting dari dana pendidikan yang dialokasikan untuk menjamin keberlangsungan proses pendidikan secara teratur, terukur, dan sesuai standar nasional. Biaya operasional ini mencakup seluruh pengeluaran rutin yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif, baik yang terkait langsung dengan proses belajar mengajar maupun komponen pendukung lainnya. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa biaya operasional tidak hanya berfokus pada kebutuhan pembelajaran inti, tetapi juga mencakup upaya menjaga keberlanjutan fungsi kelembagaan pendidikan.

⁷ Cahyadi, *Op. Cit.*

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyusunan standar pembiayaan pendidikan harus memperhitungkan seluruh aspek pengeluaran yang memengaruhi keberhasilan satuan pendidikan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep biaya operasional menurut standar nasional menjadi dasar penting dalam merumuskan metodologi penyusunan pembiayaan pendidikan yang akurat, sistematis, dan sesuai kebutuhan sekolah.

Lebih lanjut, Pasal 62 Ayat (4) PP Nomor 19 Tahun 2005 merinci komponen biaya operasional pada satuan pendidikan, termasuk madrasah, yang meliputi tiga kelompok besar. (1), gaji pendidik dan tenaga kependidikan beserta seluruh tunjangan yang melekat pada gaji, yang menjadi porsi terbesar dalam struktur biaya operasional. (2) biaya pengadaan bahan dan peralatan pendidikan habis pakai yang diperlukan dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari. (3), biaya operasi pendidikan tidak langsung, seperti kebutuhan listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi. Ketiga kelompok biaya ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan membutuhkan dukungan anggaran yang menyeluruh agar seluruh layanan pendidikan dapat berjalan optimal. Dengan memperhatikan komponen biaya tersebut, penyusunan standar pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara cermat agar setiap pos anggaran dapat dialokasikan secara proporsional, efisien, dan selaras dengan kebutuhan operasional sekolah.⁸

Ketentuan dalam PP 19/2005 ini mempertegas bahwa penyusunan standar pembiayaan pendidikan harus mempertimbangkan seluruh komponen biaya operasional secara menyeluruh. Apabila salah satu komponen tidak dihitung secara tepat, sekolah berpotensi mengalami ketidakseimbangan anggaran yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan.

1. **Perencanaan harus realistik**, yaitu mempertimbangkan kemampuan sarana, prasarana, sumber daya manusia, kondisi keuangan, dan batasan waktu. Realistik berarti tidak melebihi kapasitas sekolah, tetapi tetap memenuhi kebutuhan minimal yang diperlukan.
2. **Adanya koordinasi antar pihak terkait**, seperti kepala sekolah, bendahara, guru, dan komite sekolah. Koordinasi ini memastikan bahwa informasi kebutuhan yang dikumpulkan tidak bias serta mencerminkan keadaan sebenarnya.
3. **Perencanaan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, intuisi, dan data akurat**, sehingga sekolah dapat memprediksi kebutuhan jangka pendek dan panjang secara lebih tepat. Penggunaan data penting untuk menghindari kesalahan perhitungan dan pengalokasian dana.
4. **Perencanaan harus fleksibel**, agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan, kenaikan harga, atau kondisi darurat lain yang memerlukan penyesuaian anggaran secara cepat.⁹

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perencanaan biaya menjadi komponen penting yang memastikan bahwa standar pembiayaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan sekolah. Perencanaan biaya yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta didukung data yang akurat memungkinkan sekolah menyusun alokasi anggaran yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Implementasi perencanaan biaya yang baik juga membuat program pendidikan dapat berjalan sesuai tujuan tanpa mengalami hambatan pendanaan yang tidak perlu. Selain itu, perencanaan biaya yang fleksibel membantu sekolah menghadapi ketidakpastian, baik yang berasal dari perubahan ekonomi maupun regulasi pemerintah. Dengan demikian, perencanaan biaya tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pengaturan anggaran, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang menjaga stabilitas operasional satuan pendidikan. Seluruh proses yang dilakukan mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan standar pembiayaan, pengendalian biaya, hingga perencanaan menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan yang baik merupakan kunci untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan yang bermutu. Melalui pendekatan tersebut, sekolah dapat

⁸ Sori Alam Harahap, "Pengelolaan Biaya Pendidikan Madrasah," *JETE: Journal of Education and Teaching* 3, no. 2 (2022): 215–220, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jete.v3i2.20085>.

⁹ Raya Oktavia & Mulyawan Safwandy Nugraha, "Perencanaan Anggaran Biaya Pendidikan," *Cakrawala Didaktis: Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 1 (2025): 7–12, <https://jurnal.elakhyarpustaka.id/index.php/cakdis/article/view/2>.

mempertahankan kualitas pembelajaran sekaligus memastikan bahwa seluruh komponen biaya dikelola secara sistematis, terarah, dan akuntabel.

Meskipun perencanaan biaya memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan operasional sekolah, efektivitasnya sangat ditentukan oleh sejauh mana sekolah mampu memahami jenis-jenis pembiayaan pendidikan secara tepat. Syahputra dan Daryanto menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri dari beberapa kategori utama yang harus diidentifikasi secara akurat agar perhitungan anggaran tidak hanya formalitas tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan.¹⁰ Hal ini relevan dengan temuan Mulya yang menyatakan bahwa banyak sekolah masih keliru dalam membedakan komponen biaya, sehingga analisis kebutuhan menjadi tidak akurat. Pemahaman jenis biaya menjadi penting karena menentukan arah penyusunan standar pembiayaan. Tanpa kemampuan membedakan biaya langsung, tidak langsung, biaya pribadi, biaya sosial, maupun biaya moneter dan non-moneter, proses perencanaan menjadi rentan terhadap kekurangan informasi dan salah estimasi. Oleh karena itu, klasifikasi biaya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi menjadi landasan praktis dalam memastikan perencanaan anggaran lebih terarah dan berorientasi pada kebutuhan riil sekolah.¹¹

Dalam konteks penyusunan standar pembiayaan, tiga klasifikasi biaya utama perlu diperhatikan secara cermat: (1) biaya langsung dan tidak langsung, (2) biaya pribadi dan sosial, serta (3) biaya moneter dan non-moneter. Biaya langsung mencakup seluruh pengeluaran yang secara langsung menunjang proses pembelajaran, sedangkan biaya tidak langsung mencakup biaya hidup, transportasi, serta opportunity cost yang sering terabaikan. Ketidakmampuan sekolah menghitung seluruh komponen ini turut menjelaskan temuan Mulya terkait lemahnya analisis kebutuhan. Selanjutnya, perbedaan antara biaya pribadi dan biaya sosial menunjukkan bahwa beban pendanaan tidak hanya ditanggung pemerintah, tetapi juga keluarga.¹² Kondisi ini sejalan dengan temuan Handayani dan Huda bahwa desentralisasi menimbulkan tantangan baru karena dana publik sering tidak mencukupi kebutuhan operasional sekolah.¹³ Selain itu, ketidaktercakupnya biaya non-moneter menjelaskan temuan Yelliza et al. tentang ketidaksesuaian standar pembiayaan di lapangan. Dengan memahami keseluruhan klasifikasi ini, penyusunan biaya dapat dilakukan secara lebih realistik dan komprehensif.¹⁴

Perhitungan biaya dalam pendidikan pada dasarnya mengikuti logika produksi jasa, di mana sekolah dipandang sebagai sistem *input–proses–output* yang memerlukan berbagai komponen biaya untuk menghasilkan layanan pendidikan yang bermutu. Input pendidikan meliputi ruang, peralatan, buku, material, serta waktu guru dan tenaga kependidikan, sehingga setiap perubahan pada salah satu unsur ini memengaruhi total biaya produksi. Namun, hubungan antara input dan output pendidikan tidak selalu dapat diukur secara langsung, sehingga penetapan biaya sering menghadapi keterbatasan metodologis. Kondisi ini sejalan dengan temuan Mulya yang menunjukkan bahwa banyak sekolah kesulitan melakukan analisis kebutuhan secara akurat. Faktor eksternal seperti kenaikan harga, perubahan gaji guru, peningkatan standar pendidikan, serta pertumbuhan populasi sekolah turut memperberat perhitungan biaya.

Jenis-jenis Pembiayaan

Biaya pendidikan mencakup berbagai komponen yang harus diperhitungkan secara sistematis untuk mendukung keberlangsungan layanan pendidikan. Salah satu komponen utama adalah biaya investasi, yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana, pembangunan fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, serta pengadaan perabot dan peralatan pendukung pembelajaran. Selain itu, biaya investasi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, sertifikasi, dan program peningkatan kompetensi guru. Menurut Gaffar, perhitungan biaya investasi dilakukan berdasarkan

¹⁰ Muhammad Rizki Syahputra, *et al*, “Pembiayaan Pendidikan (MTs Islamiyah YPI Batangkuis Kab. Deli Serdang),” *Manajemen Pendidikan* 11, no. 2 (2018): 52–69, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/em/article/view/13218>.

¹¹ Mulya, *Op. Cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ Sumawar, *et al. Op. Cit.*

¹⁴ Mesiono & Roslaeni, “Model-Model Pembiayaan Pendidikan (Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Institusi Pendidikan),” *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.51672/jbpi.v2i1.10>.

“*per student place*” dengan memperhatikan lokasi, kualitas fasilitas, serta kebutuhan jangka panjang sekolah. Biaya investasi bersifat jangka panjang dan periodik, sehingga memerlukan metodologi perencanaan yang matang agar prioritas pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia dapat ditetapkan secara tepat dan berkelanjutan, mendukung mutu pendidikan yang optimal.

1. Biaya Operasional

Komponen kedua adalah biaya operasional, yaitu pengeluaran rutin yang diperlukan untuk menjaga kelancaran kegiatan pendidikan sehari-hari. Biaya ini mencakup gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan habis pakai, utilitas seperti listrik dan air, pemeliharaan sarana-prasarana, serta biaya administrasi sekolah. Yane Puspito Sari dan kawan-kawan menyatakan bahwa biaya operasional atau biaya rutin dihitung berdasarkan “*per student enrolled*” dan dipengaruhi oleh rasio guru-murid, rata-rata gaji guru, serta proporsi gaji terhadap total biaya operasional.¹⁵ Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan 2007, penyusunan standar biaya operasional harus memperhitungkan seluruh pos pengeluaran secara proporsional dan akurat agar alokasi dana mendukung efektivitas dan keberlanjutan layanan pendidikan. Tanpa pengelolaan biaya operasional yang sistematis, sekolah berisiko mengalami ketidakseimbangan anggaran, kekurangan dana, atau pemborosan.

2. Biaya Personal dan Biaya Tidak Langsung

Komponen ketiga adalah biaya personal, yaitu pengeluaran yang harus ditanggung peserta didik dan keluarganya untuk mengikuti proses pendidikan. Biaya ini meliputi pembelian buku, alat tulis, seragam, transportasi, serta kebutuhan pembelajaran lain yang secara langsung menunjang partisipasi peserta didik. Pendanaan yang berasal dari orang tua peserta didik juga disebut sebagai pendanaan dari masyarakat yang bersifat mengikat.¹⁶

3. **biaya tidak langsung** yang mencakup pengorbanan pendapatan oleh peserta didik (*earning foregone*), biaya non-moneter seperti waktu dan tenaga, serta kontribusi masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan. Dini, ayu and other menyebut biaya pribadi sebagai pengeluaran individu, sedangkan biaya masyarakat mencakup pembiayaan publik melalui pajak atau dukungan sosial lainnya.¹⁷ Pengklasifikasian biaya ini penting untuk memastikan bahwa standar pembiayaan pendidikan yang dirumuskan mencakup semua kebutuhan nyata sekolah, peserta didik, dan masyarakat, sehingga tercapai alokasi anggaran yang adil, proporsional, dan mendukung pemerataan akses pendidikan.¹⁸

Ketersediaan biaya pendidikan yang memadai merupakan faktor krusial dalam menjamin keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan mencakup seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sehingga klasifikasi biaya harus dilakukan secara cermat untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal di Indonesia, permasalahan pembiayaan pendidikan masih kompleks, terutama terkait keterjangkauan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam akses pendidikan bermutu antara kelompok ekonomi atas dan bawah, yang berdampak pada ketimpangan prestasi akademik, pengangguran, serta kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penyusunan anggaran pendidikan harus mempertimbangkan prioritas alokasi dana untuk mendukung kualitas pendidikan, mencakup fasilitas belajar, gaji guru, dan sarana penunjang lain agar seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan.

Pengelolaan anggaran pendidikan memiliki peran strategis dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, otorisasi pengeluaran, dan pengendalian biaya, sehingga penyusunan anggaran yang tepat dapat mencegah pemborosan dan memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Efisiensi pendidikan diukur dari kemampuan sistem dalam menghasilkan keluaran pendidikan maksimal dengan masukan terbatas, termasuk tenaga pendidik, sarana prasarana, dan biaya operasional. Penyusunan anggaran yang sistematis memerlukan standar fungsional yang seragam,

¹⁵ Yane Puspito Sari et al., *Pengelolaan Keuangan Pendidikan* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2024).

¹⁶ Nur Komariah, “Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan,” *Jurnal Al-Afkar* VI, no. 1 (2018): 67–94.

¹⁷ Dini Melinda Ayu et al., “Strategi Pengelolaan Keuangan Sekolah Untuk Meningkatkan Efisiensi Sumber Data,” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 4 (2024): 1596–1603, <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3759>.

¹⁸ Ferdi W. P., “Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis,” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 19, no. 4 (2013): 565–578, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>.

laporan biaya yang lengkap, serta prioritas kebutuhan berdasarkan skala urgensi dan kontribusinya terhadap kualitas pendidikan. Metode penganggaran kombinasi, yang menggabungkan perencanaan berbasis kebutuhan dan estimasi biaya, dapat menjadi strategi efektif untuk mengalokasikan dana secara proporsional dan mendukung keberlanjutan layanan pendidikan.

Pembentukan pendidikan terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung, yang meliputi gaji guru, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta dukungan biaya lain yang memengaruhi proses belajar-mengajar. Biaya langsung mencakup pengeluaran operasional harian, sedangkan biaya tidak langsung mencakup kesempatan yang hilang bagi peserta didik, kontribusi masyarakat, dan pengorbanan non-moneter seperti waktu dan tenaga. Untuk mencapai sistem pembentukan yang efektif dan efisien, peran Pemerintah dan masyarakat sangat penting, termasuk penerapan subsidi silang untuk mendukung peserta didik kurang mampu (PP No. 48 Tahun 2008). Kolaborasi ini harus didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan bersama, sehingga alokasi dana pendidikan dapat mencerminkan keadilan, keberlanjutan, dan peningkatan mutu pendidikan secara merata.¹⁹

Analisis Pembentukan Pendidikan

Pembentukan pendidikan memiliki beberapa karakteristik penting yang memengaruhi perencanaan dan pelaksanaannya. (1) Biaya pendidikan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sehingga perhitungannya biasanya dinyatakan dalam satuan *unit cost*. (2) Perhitungan *unit cost* dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu *unit cost* lengkap yang memperhitungkan seluruh fasilitas pendidikan, *unit cost* setengah lengkap yang hanya mencakup biaya bahan dan alat yang berangsur habis, dan *unit cost* sempit yang hanya mempertimbangkan biaya langsung terkait kegiatan belajar-mengajar. (3) Biaya terbesar dalam pendidikan bersumber dari faktor manusia, sehingga pendidikan sering dianggap sebagai bentuk *human investment*. (4) Selain itu, *unit cost* cenderung meningkat seiring dengan tingkat sekolah, dan biaya pendidikan dipengaruhi jenis lembaga pendidikan, di mana sekolah kejuruan memerlukan biaya lebih tinggi dibanding sekolah umum. (5) Meskipun demikian, komponen biaya pendidikan relatif konsisten dari tahun ke tahun, sehingga memungkinkan perencanaan anggaran yang lebih terstruktur.

Dalam menghitung biaya pendidikan, terdapat berbagai komponen yang harus dipertimbangkan agar kegiatan belajar-mengajar (KBM) dapat berjalan optimal. (1) Biaya pendidikan mencakup peningkatan kualitas KBM dan pembinaan kegiatan siswa, yang menjadi dasar operasional sekolah sehari-hari. (2) Komponen biaya juga mencakup pembinaan tenaga kependidikan, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta kesejahteraan guru dan staf sekolah. (3) Selain itu, biaya pengadaan bahan dan alat belajar, perawatan fasilitas, sarana kelas, dan pengelolaan sekolah juga merupakan bagian integral dari anggaran pendidikan. (4) Keseluruhan komponen ini harus diatur secara efektif agar mendukung mutu pendidikan, sesuai standar nasional dan tuntutan masyarakat.

Selain kebutuhan operasional, biaya pendidikan juga diarahkan untuk peningkatan mutu dan pengawasan manajemen sekolah. (1) Komponen biaya mencakup pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pelaporan sebagai bagian dari pengelolaan sekolah yang efektif. (2) Peningkatan mutu pada semua jenjang pendidikan, termasuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), membutuhkan alokasi dana yang cukup dan terencana. (3) Dengan pengelolaan biaya yang sistematis, seluruh komponen ini dapat mendukung pencapaian pembentukan pendidikan yang efektif, efisien, dan adil bagi seluruh peserta didik.²⁰

Model-model Biaya Pendidikan

Selanjutnya dilakukan analisis dan dideskripsikan bagaimana model-model pembentukan pendidikan. Berikut hasil dan pembahasannya: Sumber pembentukan pendidikan yang melimpah tidak menjadi jaminan bagi peningkatan mutu, jika tidak direncanakan, salah sasaran, salah pengelolaan, tidak ada pengawasan, akuntabilitas rendah, sanksi yang tidak tegas yang diberikan bagi penyeleweng, sehingga tidak ada efek jera dan moral yang rendah, dan alasan lainnya dalam pengelolaan biaya pendidikan. Model manajemen

¹⁹ Ibid.

²⁰ Nurhalimah, *Op. Cit.*

pembentukan pendidikan di Indonesia sebenarnya merupakan modifikasi dan gabungan dari berbagai model pembentukan pendidikan di Negara lain di dunia. Model-model pembentukan pendidikan itu pada prinsipnya memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Terkait dengan model pembentukan pendidikan, bahwa terdapat 4 (empat) model pembentukan pendidikan, yaitu: 1) subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi; 2) pendidikan gratis pendidikan tinggi diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu; 3) pendidikan gratis diberikan sampai SMA, dan pendidikan tinggi tetap membayar SPP sekalipun masih menerima subsidi; dan 4) semua jenjang pendidikan wajib membentuk diri sendiri. Penggalian sumber dana dapat diperoleh dari upaya kerja sama dengan industri atau memanfaatkan bantuan CSR (*corporate social responsibility*), membentuk komunitas alumni, atau bersumber dari orangtua/wali peserta didik.²¹

Terdapat beberapa model pembentukan pendidikan yang diterapkan dengan tujuan untuk mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan. (1) Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*) memberikan bantuan finansial negara kepada sekolah tanpa mempertimbangkan kemampuan pembayaran pajak daerah, dengan alokasi dana berdasarkan jumlah siswa. Kelebihannya meliputi kemampuan sekolah dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan belajar-mengajar dan memfasilitasi pembelajaran, sedangkan kekurangannya mencakup potensi penyimpangan dana dan ketidakadilan antar daerah. (2) Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*) mengalokasikan dana lebih besar untuk daerah miskin, meningkatkan efisiensi anggaran dan akuntabilitas, namun terbatas dalam mendukung program peningkatan mutu pendidikan dan rawan penyimpangan anggaran. (3) Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranteed Tax Base Plan*) menyesuaikan bantuan negara berdasarkan kondisi ekonomi tiap distrik, memberikan perincian pembentukan yang jelas, tetapi hanya efektif bagi distrik tertentu dan terbatas untuk peningkatan mutu pendidikan. (4) Model Persamaan Persentase (*Percentage Equalizing Model*) menekankan pembentukan lebih besar untuk daerah kurang miskin guna memperkuat kesetaraan mutu pendidikan, walaupun rawan penyimpangan dan minim transparansi.

Selain model tradisional, terdapat model pembentukan pendidikan yang lebih menekankan pada pemerataan kemampuan dan kebutuhan spesifik siswa. (1) Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*) memanfaatkan pajak distrik kaya untuk mendukung sekolah distrik miskin, mendukung peningkatan mutu pendidikan namun mengurangi penerimaan pajak negara. (2) Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Model*) mengeliminasi perbedaan lokal dalam pendanaan dan perpajakan, meningkatkan alokasi untuk kegiatan belajar-mengajar dan sarana pendidikan, tetapi membutuhkan anggaran APBN yang besar dan rawan penyimpangan. (3) Model Sumber Pembentukan (*The Resources Cost Model*) menyesuaikan pendanaan dengan kondisi ekonomi tiap daerah, memfasilitasi sekolah terpencil, namun memungkinkan pungutan tambahan dan menimbulkan kesenjangan sosial. (4) Model Surat Bukti/Penerimaan (*Models of Choice and Voucher Plans*) memberikan subsidi langsung kepada individu atau institusi, memberikan fleksibilitas bagi orang tua dan sekolah swasta, tetapi dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan penyimpangan dana. (5) Model Rencana Bobot Siswa (*Weight Student Plan*) dan model berbasis pengalaman, usulan, atau kebijaksanaan, menekankan prioritas alokasi dana berdasarkan karakteristik siswa dan kebutuhan spesifik sekolah, sehingga dapat mendukung perencanaan pendidikan yang lebih terarah dan adil.²²

Selain model tradisional, terdapat berbagai model pembentukan pendidikan yang menekankan pemerataan kemampuan dan kebutuhan spesifik siswa, seperti *Power Equalizing Plan*, *Full State Funding Model*, *The Resources Cost Model*, *Models of Choice and Voucher Plans*, serta *Weight Student Plan* dan model berbasis pengalaman, usulan, atau kebijaksanaan, yang menyesuaikan alokasi dana berdasarkan karakteristik siswa, kondisi ekonomi wilayah, dan kebutuhan sekolah. Pendekatan ini memungkinkan sekolah di daerah terpencil maupun kurang mampu tetap memperoleh sumber daya yang memadai, sehingga berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Efektivitas alokasi anggaran untuk

²¹ Oktrigana Wirian, *et al*, “Model-Model Pembentukan Pendidikan,” *Educate: Journal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 1 (2022): 44–56, <https://doi.org/10.56114/edu.v1i1.211>.

²² *Ibid.*

fasilitas belajar, gaji tenaga pendidik, dan program pengembangan kompetensi siswa berpengaruh langsung terhadap kemampuan sekolah menyediakan layanan pendidikan yang optimal. Sekolah yang mampu memanfaatkan anggaran secara efisien dan tepat sasaran akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bekerja, mendukung produktivitas nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan biaya pendidikan yang akurat, adil, dan efektif menjadi prasyarat utama tercapainya kualitas pendidikan yang merata dan berkelanjutan.

Tantangan Pembiayaan Pendidikan

Dari perspektif ekonomi, pendidikan dikatakan bermutu apabila lulusan mampu langsung memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, sehingga produktivitas nasional meningkat dan pertumbuhan ekonomi terdorong lebih tinggi. Investasi pendidikan, termasuk alokasi anggaran untuk fasilitas belajar, gaji tenaga pendidik, dan program pengembangan kompetensi siswa, menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Sekolah yang menyediakan lingkungan belajar optimal dengan sumber daya manusia berkualitas akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bekerja, sehingga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas alokasi anggaran berpengaruh langsung terhadap kemampuan sekolah dalam menyediakan sarana dan layanan pendidikan yang memadai. Dengan demikian, efisiensi dan kecermatan pengelolaan biaya pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi prasyarat untuk mutu pendidikan yang selaras dengan kebutuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Dari perspektif sosiologi, pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, termasuk peningkatan mobilitas sosial, perkembangan budaya, pertumbuhan kesejahteraan, serta pengurangan kebodohan. Kualitas pendidikan diukur berdasarkan seberapa efektif pendidikan dapat memberikan manfaat sosial, bukan hanya bagi individu tertentu. Oleh karena itu, alokasi biaya pendidikan harus memperhatikan keseimbangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, agar keterjangkauan pendidikan bagi kelompok kurang mampu meningkat. Ketersediaan guru berkualitas, kelengkapan sarana prasarana, dan dukungan biaya operasional merupakan indikator penting yang menentukan kemampuan sekolah dalam memberikan pendidikan bermutu. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa kesenjangan anggaran dan keterbatasan fleksibilitas penggunaan dana dapat memengaruhi pencapaian kualitas pendidikan di daerah kurang berkembang.

Dalam perspektif pendidikan, mutu pendidikan dinilai dari kualitas proses belajar-mengajar dan kemampuan lulusan dalam berpikir kritis serta memecahkan masalah. Proses pendidikan yang efektif dan efisien membutuhkan pemanfaatan sumber daya secara optimal, metode pengajaran yang tepat, serta sarana prasarana yang mendukung. Sebagai contoh, sekolah di wilayah elit dengan guru berkualifikasi tinggi dan fasilitas lengkap cenderung menyelenggarakan proses pendidikan lebih optimal dibandingkan sekolah di wilayah kurang berkembang, sehingga mutu lulusan pun berbeda. Hal ini menekankan perlunya perencanaan biaya pendidikan yang cermat, termasuk alokasi untuk sarana, pengembangan kompetensi guru, dan biaya kegiatan belajar. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara standar pembiayaan dan praktik anggaran di sekolah memengaruhi kemampuan sekolah dalam mencapai mutu proses yang ideal. Dengan pengelolaan biaya yang tepat, setiap peserta didik berkesempatan memperoleh hasil belajar maksimal dan menjadi lulusan yang kompeten.²³

Strategi Penguatan Pembiayaan Pendidikan

Dalam menghadapi keterlambatan penyaluran dana dan keterbatasan fleksibilitas anggaran pasca-desentralisasi, sekolah perlu menerapkan mekanisme manajemen keuangan yang adaptif. Hal ini mencakup (1) pengembangan sistem perencanaan anggaran berbasis prioritas kebutuhan, seperti alokasi untuk gaji guru, pemeliharaan sarana, pengadaan alat belajar, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta (2) pembangunan koordinasi yang erat dengan dinas pendidikan setempat untuk mempercepat pencairan dana dan memastikan

²³ Purwi Istiyarini & Muhammad Hanif, "Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan) Di SMP Negeri 2 Karanglewas," *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 51–60, <https://doi.org/10.37985/cw37dv81>.

penggunaan anggaran sesuai ketentuan. Penelitian Handayani dan Huda menunjukkan bahwa hambatan administrasi mengurangi efektivitas anggaran, sehingga perbaikan prosedur internal dan sistem monitoring anggaran menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara alokasi dana dan pemanfaatannya. Dengan pendekatan ini, keterlambatan dana dapat diminimalkan dan proses belajar-mengajar tetap berjalan lancar tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.²⁴

Efektivitas pembiayaan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam menganalisis kebutuhan biaya secara menyeluruh dan merencanakan anggaran secara cermat. Strategi yang dapat diterapkan meliputi (1) pendekatan berbasis data untuk menghitung kebutuhan biaya operasional harian, gaji guru, pengadaan sarana-prasarana, dan pengembangan kompetensi siswa, serta (2) penetapan prioritas alokasi anggaran berdasarkan urgensi dan kontribusinya terhadap mutu pendidikan, sehingga pengeluaran menjadi efisien dan berdampak langsung. Penelitian Mulya menegaskan bahwa perencanaan tepat meningkatkan kemampuan sekolah dalam menyediakan sarana dan layanan pendidikan memadai. Selain itu, (3) evaluasi dan audit internal secara berkala dapat menilai kesesuaian realisasi anggaran dengan rencana, sehingga potensi pemborosan atau kesalahan alokasi dapat diantisipasi lebih awal.²⁵

Standar pembiayaan yang belum optimal menuntut strategi penguatan sistem alokasi dana, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, agar komponen biaya operasional dan investasi dapat terpenuhi secara proporsional. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain (1) penerapan subsidi silang atau model pembiayaan berbasis kebutuhan tiap sekolah untuk mendukung peningkatan sarana, kompetensi guru, dan kegiatan belajar-mengajar, (2) pelibatan masyarakat melalui partisipasi dana atau program *Corporate Social Responsibility* untuk menutupi kekurangan anggaran, serta (3) *monitoring* dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan ketercapaian standar pendidikan dan pemerataan mutu di seluruh wilayah. Pendekatan kolaboratif ini dapat mengoptimalkan penggunaan dana, meningkatkan efisiensi, dan menjamin keberlanjutan mutu pendidikan, sekaligus menjawab tantangan yang diidentifikasi.²⁶

Secara keseluruhan, penyusunan standar pembiayaan pendidikan harus dipahami sebagai proses komprehensif yang tidak hanya menuntut pemahaman terhadap klasifikasi biaya, tetapi juga analisis mendalam terhadap kebutuhan riil satuan pendidikan. Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa setiap komponen biaya baik investasi, personal, maupun operasional memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan kualitas layanan pendidikan. Ketidaktepatan dalam perhitungan biaya terbukti menjadi penyebab utama ketidakseimbangan anggaran dan rendahnya mutu pendidikan di berbagai daerah. Oleh karena itu, metodologi penyusunan biaya harus mengintegrasikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta fleksibilitas dalam merespons perubahan ekonomi maupun kebijakan. Dengan pendekatan berbasis data dan evaluasi berkala, standar pembiayaan dapat disusun secara lebih terarah sehingga mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Selain itu, uraian dalam pembahasan memperlihatkan bahwa model-model pembiayaan pendidikan yang diterapkan di berbagai negara dapat menjadi acuan dalam memperkuat sistem pembiayaan di Indonesia. Namun, penerapannya tetap harus disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan regulasi pendidikan nasional. Sekolah dituntut mampu mengelola anggaran secara adaptif melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan, perencanaan berbasis kebutuhan, serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana. Penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan biaya sangat menentukan tingkat ketercapaian standar mutu pendidikan. Dengan demikian, pengembangan metodologi penyusunan standar pembiayaan bukan hanya langkah teknis, tetapi strategi fundamental untuk mencapai pemerataan, peningkatan kualitas, dan keberlanjutan pendidikan di seluruh wilayah. Pembiayaan yang dirancang secara tepat akan memberikan dasar kuat bagi satuan pendidikan dalam mengimplementasikan program yang relevan dan berdampak nyata.

²⁴ Sumawar, *et al. Loc Cit.*

²⁵ Mulya, *Loc. Cit.*

²⁶ Ida Ayu Estri Sanjiwani, "Terhadap Kualitas Proses Pembelajaran Dan Aspirasi Pendidikan Siswa (Studi Tentang Persepsi Para Siswa SMA Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2011/2012)," *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (2012), <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/japi.v3i2.459>.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar pembiayaan pendidikan membutuhkan metodologi yang komprehensif, terstruktur, dan berbasis data agar setiap komponen biaya dapat dihitung secara akurat. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan biaya, pemetaan komponen pengeluaran, serta analisis kesesuaian antara standar pembiayaan dengan kondisi nyata satuan pendidikan. Ketepatan dalam analisis kebutuhan menjadi faktor kunci untuk memastikan alokasi anggaran tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga mampu mendukung keberlanjutan layanan pendidikan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketidaktepatan perencanaan biaya seringkali menghambat peningkatan mutu pendidikan, sehingga metodologi yang kuat diperlukan untuk meminimalkan ketimpangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pendidikan.

Lebih lanjut, kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penyusunan standar pembiayaan pendidikan harus memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu (1) perencanaan biaya perlu disusun berdasarkan data aktual serta kebutuhan riil sekolah untuk menghindari kesalahan estimasi anggaran; (2) analisis biaya harus mencakup seluruh klasifikasi, mulai dari biaya investasi, operasional, personal, hingga biaya tidak langsung agar tidak terjadi ketidakseimbangan pendanaan; (3) pemilihan model pembiayaan perlu disesuaikan dengan konteks ekonomi dan kebijakan nasional sehingga implementasinya tetap relevan; dan (4) koordinasi antara pemangku kepentingan, termasuk sekolah, pemerintah, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pemanfaatan anggaran. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, standar pembiayaan dapat disusun secara lebih tepat, adil, dan mendukung pemerataan mutu Pendidikan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar penyusunan standar pembiayaan pendidikan dilaksanakan melalui proses yang lebih terstruktur, berbasis bukti, dan didukung oleh data empiris yang mutakhir. Setiap satuan pendidikan perlu mengembangkan mekanisme pemetaan kebutuhan biaya yang sistematis, mencakup seluruh komponen pembiayaan mulai dari biaya investasi, operasional, personal, hingga biaya tidak langsung. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami analisis biaya juga diperlukan agar proses perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan riil lembaga. Pemerintah dan pemangku kebijakan diharapkan memperkuat regulasi, menyediakan pedoman teknis yang lebih rinci, serta memastikan bahwa implementasi standar pembiayaan berjalan konsisten di berbagai daerah. Selain itu, penyempurnaan prosedur evaluasi anggaran perlu dilakukan secara berkala agar setiap ketidaksesuaian dapat segera diperbaiki sehingga efektifitas pendanaan pendidikan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, peneliti menyarankan agar penerapan model pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan variasi kondisi ekonomi, sosial, dan geografis pada setiap wilayah sehingga distribusi anggaran dapat berlangsung secara lebih adil dan proporsional. Sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu memperkuat koordinasi dalam penyusunan serta pengawasan pembiayaan agar transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Pemberdayaan komite sekolah juga menjadi aspek penting untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan secara objektif dan tidak membebani peserta didik. Selain itu, penelitian lanjut disarankan untuk memperluas fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pembiayaan, seperti manajemen anggaran, kapasitas kelembagaan, dan kualitas perencanaan program pendidikan. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji efektivitas model pembiayaan alternatif yang mulai diterapkan di berbagai negara, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih komprehensif bagi pengembangan standar pembiayaan yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan bagi peningkatan mutu Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Dini Melinda, Re Girindratta, Nida Nurfadillah, Firyal Fariz, and Malki Al Mashur. "Strategi Pengelolaan Keuangan Sekolah Untuk Meningkatkan Efisiensi Sumber Data." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 4 (2024): 1596–1603. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3759>.
- Cahyadi, Ady. "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam." *ESENSI: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 4, no.

- 1 (2014): 67–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>.
- Harahap, Sori Alam. “Pengelolaan Biaya Pendidikan Madrasah.” *JETE: Journal of Education and Teaching* 3, no. 2 (2022): 215–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jete.v3i2.20085>.
- Hasibuan, Zainal A. *Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*. Universitas Indonesia, 2007.
- Istiyarini, Purwi, and Muhammad Hanif. “Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan) Di SMP Negeri 2 Karanglewas.” *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 51–60. <https://doi.org/10.37985/cw37dv81>.
- Komariah, Nur. “Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan.” *Jurnal Al-Afkar* VI, no. 1 (2018): 67–94.
- Mesiono, and Roslaeni. “Model-Model Pembiayaan Pendidikan (Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Institusi Pendidikan).” *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.51672/jbpi.v2i1.10>.
- Mulya, Citra. “Implementasi Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengelolaan Dana BOS Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review* 3, no. 2 (2019): 149–54. <https://doi.org/http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:4321ijemar.v3i2.43670>.
- Nurhalimah, Siti. “Konsep Dan Jenis Pembiayaan Pendidikan.” *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/moe.v5i1.5240>.
- Oktavia, Raya, and Mulyawan Safwandy Nugraha. “Perencanaan Anggaran Biaya Pendidikan.” *Cakrawala Didaktis: Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 1 (2025): 7–12. <https://jurnal.elakhyarpustaka.id/index.php/cakdis/article/view/2>.
- P., Ferdi W. “Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 19, no. 4 (2013): 565–78. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>.
- Sanjiwani, Ida Ayu Estri. “Terhadap Kualitas Proses Pembelajaran Dan Aspirasi Pendidikan Siswa (Studi Tentang Persepsi Para Siswa SMA Dwijendra Denpasar Tahun Pelajaran 2011/2012).” *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (2012). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/japi.v3i2.459>.
- Sari, Yane Puspito, Diana Widhi Rachmawati, Suci Rahmawati, Ferdinando Solissa, M. Fathun Niam, Andrita Purnamasari, Farid Wajdi, et al. *Pengelolaan Keuangan Pendidikan*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2024.
- Sepradeni, Merri Yelliza, Devia Efriza, and Deka Darmayanti. “Analisis Pelaksanaan Standar Pembiayaan Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Amanah Sungai Penuh.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 21525–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30388>.
- Sumawar, Isman, Hasnayadi Sukron, and Mohammad Mustari. “Analisis Kebijakan Yang Mengatur Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar.” *Journal Education of Teacher Training And Learning* 3, no. 1 (2023): 37–44. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/PEDIAMU/>.
- Syahputra, Muhammad Rizki, Eka Daryanto, and Irsan Rangkuti. “Pembiayaan Pendidikan (MTs Islamiyah YPI Batangkuis Kab. Deli Serdang).” *Manajemen Pendidikan* 11, no. 2 (2018): 52–69. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/em/article/view/13218>.
- Wirian, Oktrigana, Nelly Agustina, and Amiruddin Siahaan. “Model-Model Pembiayaan Pendidikan.” *Educate: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 1 (2022): 44–56. <https://doi.org/10.56114/edu.v1i1.211>.